

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiono Herlien, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efendi, A'an, dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismaya, Samun, 2018, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Edisi 2, Suluh Media, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi, 2011, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, UB Press, Malang.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)*, Djambatan, Jakarta.
- Hidayat, Rahmat, 2003, *Pengalihan Hak Atas Tanah dan Peranan PPAT*, Sumber Media, Jakarta.
- J Moleong, Lexy, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Remadja Karya, Bandung.
- Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadjiyono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan*

dalam Hukum Administrasi, Lakbang Pressindo, Yogyakarta.

- Salihendo, Jhon, 1994, *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, P.T. Tatanusa, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet.1. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sarwoto, 1968, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sigian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerojo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Sujamto, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan Indonesia*, Sinar Grapika, Jakarta
- Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet.7. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi Adrian, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Thoha Mifta, 2002, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Jurnal/Tesis

Cahyowa ti, Djumardin, RR. “Kewenangan Camat Dan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Setelah Berlakunya UUJN”, *Jurnal Notariil*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Vol.2, Nomor 2, Bulan November 2017.

Asriyati, “Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap PPAT Sementara Di Desa Karya Jaya Bhakti, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.

Zulkarnain, Ockhy Loedvian, “Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Mouw, Yolanda, “Peran Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Muthohar, Muhammad, “Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali)”, *Jurnal Akta*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2017.

D. Sumber Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses tanggal 10 Maret 2021.